

Evaluasi pengelolaan risiko teknologi informasi ti pada instansi pemerintah : studi kasus Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri = Evaluation of it risk management in government agencies : case study of Directorate General of Population and Civil Registration Ministry of Home Affairs

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20367343&lokasi=lokal>

Abstrak

[Salah satu program flagship Dewan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional (DeTIKNas) berdasarkan Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2006 yaitu Nomor Identitas Nasional (NIN). NIN ini merupakan komponen inti pada blueprint TIK Indonesia tentang e-Government. Pelaksana program ini adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri. Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan bentuk pelaksanaan program NIN. Pada tahun 2011-2012 dilaksanakan pelayanan penerapan KTP Elektronik (e-KTP) di seluruh wilayah Indonesia. Ditjen Dukcapil tidak terlepas dari penggunaan Teknologi Informasi (TI) untuk menghasilkan informasi dan memberikan pelayanan TIK yang berkualitas.

Penggunaan TI selain meningkatkan kecepatan dan keakuratan informasi serta pelayanan TIK, juga meningkatkan berbagai jenis risiko. Tingginya tingkat ketergantungan organisasi terhadap layanan TIK untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi menjadi hal penting diperlukannya manajemen risiko TI untuk mengurangi dan menanggulangi risiko-risiko yang mungkin terjadi sehingga kerugian bisnis organisasi dapat diminimasi.

Pada karya akhir ini, peneliti mencoba menyusun profil risiko TI, langkah-langkah mitigasi dan penanggulangan risiko TI pada pelayanan penerapan e-KTP. Standar manajemen risiko TI yang digunakan framework RiskIT.

Hasil dari penelitian ini berupa profil risiko TI, langkah mitigasi beserta rekomendasi pengendalian terhadap risiko tersebut dan prosedur penanggulangan risiko TI yang sudah terjadi., One of the flagship programs Dewan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional (DeTIKNas) by the Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2006 is National Identity Number (NIN). NIN is a core component of the Indonesian Information and Communication Technology (ICT) blueprint on e-Government. Implementing this program is Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Ministry of Home Affairs. Nomor Induk Kependudukan (NIK) is a form of program implementation NIN. Implemented in 2011-2012 Electronic Identity Card application services (e-KTP) in all parts of Indonesia. Ditjen Dukcapil is inseparable from the use of Information Technology (IT) to generate information and provide a quality ICT services.

The use of IT in addition to improving the speed and accuracy of information and ICT services, also increases the risk of various types . The high level of dependence on ICT services organization to run the main tasks and functions become important need for IT risk management to reduce and mitigate the risks that may occur so that the organization's business losses can be minimized.

At the end of this work, researchers try to construct profiles of IT risk, mitigation measures and mitigation of IT risks in the implementation of e-ID card service. IT risk management standards used RiskIT framework.

The results of this study in the form of IT risk profile, mitigation measures and recommendations to control the risk and IT risk management procedures that have been happening.]